

**Muhammad Nur Matdoan**  
FKIP Universitas Pattimura Ambon  
[mnur03@gmail.com](mailto:mnur03@gmail.com)



LPPM STIA Said Perintah

Volume 1, No. 2, September 2020

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine: 1) the effectiveness of 2013 curriculum planning in educational units (SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA, SMK) in Ambon City and Central Maluku Regency 2) the effectiveness of 2013 curriculum development in educational units in Ambon City and Central Maluku Regency 3) the effectiveness of the 2013 curriculum implementation in the education units of Ambon City and Central Maluku Regency. This type of research is descriptive qualitative using unstructured interview guidelines for data collection purposes with 42 informants.*

*The research results are; The education unit in carrying out the planning, both the education unit and the education and culture office, has formed a curriculum development team (TPK) in Ambon City whose steps are; (1) for the city level, the team works to provide material in the form of training to school principals, supervisors, teacher working groups (KKG) and subject teacher deliberations (MGMP) and holds workshops for guiding teachers, especially in the context of efforts to increase teacher competence. (2) The parties involved in the curriculum development team consist of; school committees, education boards, education offices, professional associations, school principals, the world of industry and the world of work (DUDI), natural resources and socio-culture, all work together to monitor and evaluate to validate the curriculum documents that have been made.*

*Keywords : Effectiveness, Implementation, Policy, Curriculum 2013*

### **Pendahuluan**

Sepanjang sejarah Negara Indonesia sampai dengan saat ini, tercatat telah ada 10 kurikulum yang dimulai dari kurikulum pertama tahun, 1947, 1952, 1964, 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, Kurikulum edisi revisi 1999, dan kurikulum 2004, serta yang dilanjutkan dengan lahirnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan dekade terakhir ini disempurnakan kedalam Kurikulum 2013 (K13). Kurikulum 2013 yang secara nasional mulai diberlakukan tahun ajaran 2014 masih

terus menjadi sorotan dan masih memerlukan pengawalan, pengawasan dari semua pihak yang berkepentingan sehingga memperoleh hasil yang baik sebagaimana harapan pemerintah dan masyarakat, serta harapan Undang-undang. Utamanya menyangkut implementasi kurikulum 2013 yang dinilai masih banyak kekurangan.

Terdapat beberapa permasalahan klasik pada K13, yang harus diketahui jawabannya yaitu; Penyeragaman tema di seluruh kelas, sampai metode, isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas, penyusunan konten Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang tidak seksama sehingga menyebabkan ketidakselarasan. Masalah lainnya yakni Kompetensi Spiritual dan Sikap terlalu dipaksakan, metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa. Ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga tertumpuk pada siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan di luar sekolah. (Tempo.co, 2013).

Selain persoalan paradigmatik, seperti mengubah *mindset* guru, ada problem teknis yang berkaitan dengan perubahan struktur kurikulum yang menyebabkan adanya pelajaran yang hilang maupun bertambahnya jam. Semuanya itu berimplikasi pada nasib guru. Bagi satuan pendidikan swasta, kurikulum baru (K13) jelas menimbulkan beban baru bagi yayasan, karena harus memfasilitasi peningkatan kualitas guru lewat pelatihan, pengadaan perpustakaan yang lengkap, dan pendidikan tambahan agar guru dapat mengimplementasikan kurikulum baru tersebut secara baik, dengan biaya ditanggung sendiri oleh pihak yayasan, ujungnya dipikul oleh para orang tua murid. (Tempo.co, 2013).

Berdasarkan kompleksitas berbagai permasalahan pendidikan dalam implementasi kebijakan K13 sebagaimana dikemukakan di atas, serta kondisi yang dialami pada satuan pendidikan saat ini, khususnya satuan pendidikan yang ada di Provinsi Maluku, bahkan mungkin ada permasalahan yang secara spesifik sangat berbeda yang dialami oleh satuan pendidikan di Maluku dengan karakteristik sebagai daerah kepulauan, yang tidak dialami oleh sekolah di luar daerah Maluku.

Kondisi riil yang terdapat di lapangan saat ini, pada satuan pendidikan daerah gugus pulau di Provinsi Maluku terutama daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T)

yaitu minimnya daya saing sekolah termasuk implementasi kebijakan Kurikulum 2013 dibandingkan dengan satuan pendidikan di luar daerah Maluku. Hal ini di antaranya disebabkan oleh rendahnya inisiasi inovasi serta komitmen yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk menginisiasi perubahan sekolah menjadi lebih baik, dirasakan sangat berat, apalagi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, dan guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas tidak memiliki bayangan kemana dan bagaimana sekolah dan kelas pembelajaran harus dikelola. Kondisi daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan kendala geografis yang sangat kompleks serta kesulitan rentang kendali yang dialami, sampai saat ini belum tersentuh secara merata, sehingga menyebabkan mutu pendidikan tidak setara dengan daerah lain diluar Maluku. Jika kondisi ini tidak diperbaiki maka pendidikan didaerah Maluku tidak akan berubah dari sisi kemampuan daya saingnya dengan daerah lain di Indonesia, bahkan dunia Internasional.

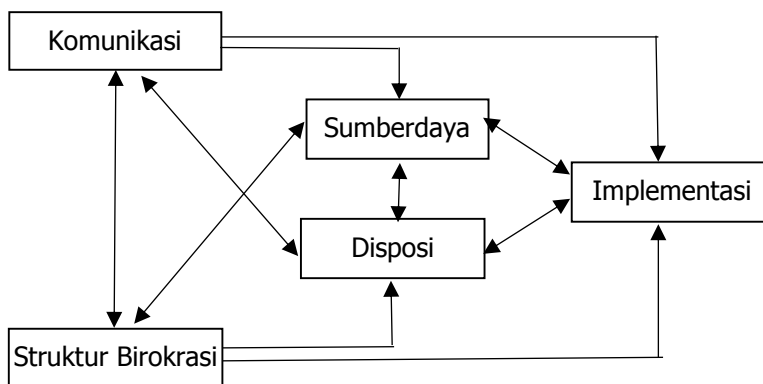
Kota Ambon selaku ibu kota provinsi Maluku diambil sebagai indikator mutu untuk melihat tingkat keberhasilannya dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Maluku. Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah termasuk daerah 3T, dengan kondisi mutu pendidikan tidak terlalu berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Maluku. Selain itu kedua kabupaten/kota ini merupakan lokasi terdekat, mudah dijangkau untuk perolehan data penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, dari penelitian ini diharapkan dapat melihat sejauhmana tingkat Efektivitas Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 oleh implementor pada satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK) pada Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah untuk dapat menemukan berbagai permasalahan pokok yang dialami selama ini oleh para implementor dalam mengimplementasi kebijakan kurikulum 2013 dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan antara satuan pendidikan yang telah melaksanakan K13 di Kota Ambon dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku.

## Kajian Pustaka

### Implementasi Kebijakan Publik Model Edward III;

Menurut George C. Edwards III, (Widodo, 2011) implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan, yang ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Diagram dampak dalam implemnatasi menurut George C. Edwards III tergambar sebagai berikut.



### Implementasi Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan

Kebijakan pendidikan menurut Nugroho Riant Dwijodijoto, (2013) dijelaskan, bahwa pendidikan sebenarnya dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pemerintah menganggap bahwa pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi perkembangan sebuah negara. Kebijakan publik termasuk didalamnya kebijakan pendidikan dalam pebuatannya melalui tahapan yang panjang. Winarno (2005) dan Dun (2003) dalam Nugroho Riant Dwijodijoto, (2013) membagi menjadi lima tahapan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Lima tahap ini kalau mendasarkan pada definisi diatas harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu pemerintah, aktor-aktor diluar pemerintah (kelompok kepentingan dan kelompok penekan), serta faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah mempengaruhi kebijakan.

Evaluasi kurikulum pendidikan di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1947, 1952, 1964, 1968 dan 1975. Setelah satu dasawarsa kurikulum pendidikan tahun 1975 tersebut disempurnakan menjadi kurikulum 1984. Kemudian dievaluasi lagi menjadi kurikulum 1989. Namun demikian, dari evaluasi kurikulum pendidikan sejak tahun 1975 hingga tahun 1989 tidak memunculkan perubahan yang signifikan dan baru setelah menginjak pada kurikulum tahun 1994 terdapat perubahan signifikan. Selanjutnya pada tahun 1999 dilakukan pengembangan untuk menyempurnakan kurikulum 1994. Perubahan kurikulum terus dilakukan hingga pada tahun 2004 muncul Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Selanjutnya pada tahun 2007 KBK ini menjadi dasar pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) seperti yang dikutip dari (Apradipto, 2015).

Kurikulum 2006 (KTSP) dikembangkan menjadi Kurikulum 2013 dengan dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad ke 21 yang ditandai dengan abad ilmu pengetahuan, *knowledge-based society* dan kompetensi masa depan. Pelaksanaan Kurikulum 2013 mulai berjalan pada tahun ajaran 2013/2014, jenjang SD kelas I dan IV, SMP kelas VII, dan SMA/SMK kelas X. (Sumber: Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013). Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik (Apradipto, 2015).

## **Efektivitas Program**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2011). Lokus Penelitiannya adalah Satuan Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) yang digunakan untuk mengambil data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku tengah.

Data yang dibutuhkan dan dikumpulkan pada tahap awal penelitian ini yaitu berupa data hasil analisis dan kajian (1) perencanaan kurikulum 2013, (2) data pengembangan kurikulum 2013 (3) data implementasi kurikulum 2013, pada Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data tersebut maka diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu *person*, *place*, dan *paper* (Arikunto, 2013).

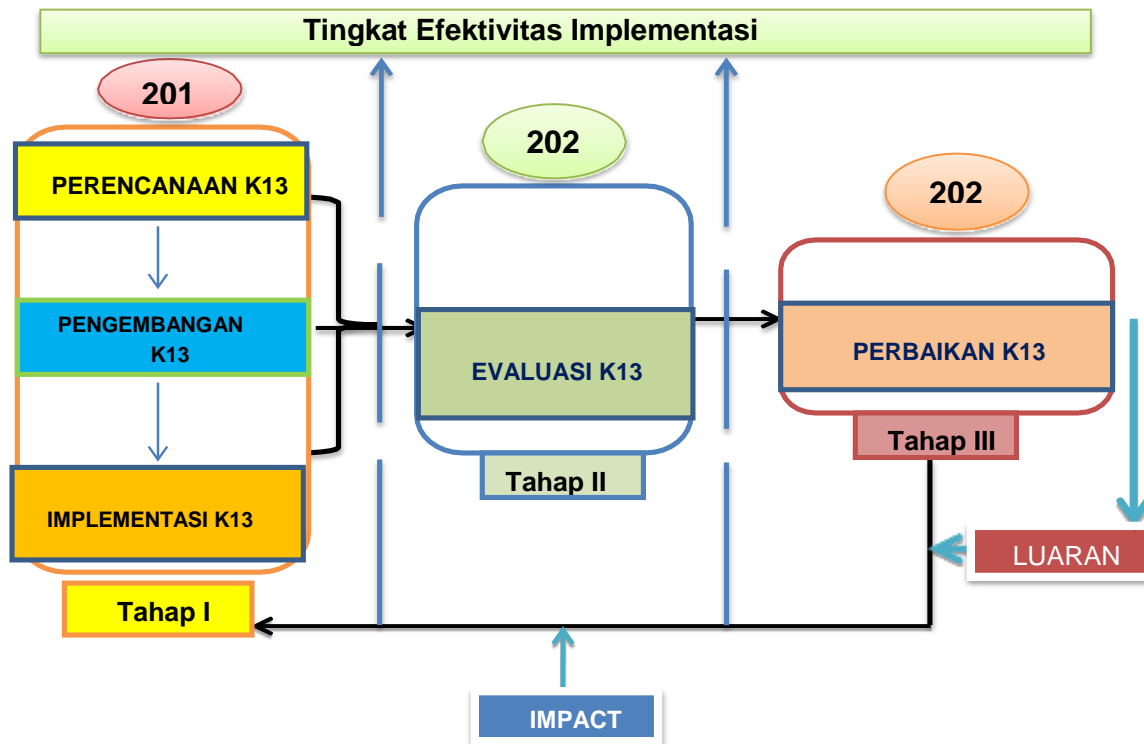
Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk memperoleh data dengan informannya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kasi Pengembangan Kurikulum Disdikbud pada Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK pada Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Wakasek Kurikulum SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK pada masing-masing setiap Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Pengawas Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK pada masing-masing setiap Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
- e. Guru guru SD/MI, guru SMP/Mts, guru SMA/MA, guru SMK pada masing-masing Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
- f. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat pada masing-masing Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Data diperoleh dari fenomena yang terjadi di lapangan, dan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK) sebagai berikut;

- 1) Data primer berupa hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan dari; (a) 6 orang tokoh masyarakat, 4 orang tokoh budayawan, 4 orang tokoh agama. (b) 2 orang kepala sekolah, 4 orang guru. (c) 6 orang tua siswa/anggota masyarakat. (d) 2 orang kepala UPTD. (5) 2 orang Kepala Dinas Dikbud Kab./Kota. (e) 2 orang Kasi Pengembangan Kurikulum Dinas Dikbud Kab./Kota. (f) 2 orang tokoh adat. (g) 2 orang tokoh politik. (h) 2 orang *stakeholders*. (i) 4 orang siswa/peserta didik. (j) 2 orang tokoh pemuda. Jumlah keseluruhan informan yang memberikan data dalam mendukung hasil penelitian ini sebanyak 42 (empat puluh dua) informan.
- 2) Fenomena implementasi kebijakan kurikulum 2013, terkait dengan perencanaan kurikulum 2013, pengembangan kurikulum 2013, implementasi kurikulum 2013 serta perubahan dan evaluasi kurikulum 2013.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini adalah berupa: Instrumen kepada informan terdiri atas: pedoman



wawancara tidak terstruktur, dan observasi yaitu; 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah daftar pertanyaan terbuka yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Efektivitas Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 dan 2) Pengembangan instrumen dilakukan dengan berpedoman pada tabel matriks pengembangan instrumen yang terdiri dari 2 (dua) bagian utama yaitu: fokus masalah dan deskripsi fokus masalah.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model analisis editing. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh; berupa data *reduction*, data *display*, data *conclusion drawing*/verifikasi. Tahap akhir analisis data ini adalah mengadakan keabsahan pemeriksaan data. Setelah selesai tahap ini dimulai dengan tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode seperti; (pemrosesan satuan/*unityzing*, kategorisasi, dan diakhiri penafsiran data). Bagan alur kegiatan penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar dibawah ini (Huberman, A.M., 1992 dan Burhan Bungin, H. M., 2010).



## **Hasil dan Pembahasan**

Kajian selanjutnya disajikan hasil analisis kondisi lingkungan eksternal berupa data komparasi hasil temuan lapangan dengan indikator 8 standar nasional pendidikan (SNP) pada beberapa sekolah sebagai contoh, antara lain sebagai berikut: SMP Negeri 14, SMP Negeri 2, SMP Al- Wathan, SMP Muhammadiyah dan MTs Al Fatah yang digunakan sebagai sasaran penelitian Efektifitas Perencanaan Kebijakan K13 pada satuan pendidikan di Kota Ambon. Sajian analisis hasil penelitian dilakukan berdasarkan petunjuk teknis analisis konteks dan indikator kunci 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana anjuran BSNP, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan, dimana alur kerjanya berdasarkan alur prosedur kerja analisis konteks yang terdiri dari komponen atau aspek yang diamati, kondisi ideal yang diharapkan, kondisi riil yang ditemukan berupa peluang dan tantangan, kesenjangan yang terjadi serta upaya pencapaian dan tindak lanjut.

Komponen yang diamati dalam penelitian adalah tim pengembang kurikulum (TPK), yang terdiri dari kepala sekolah, TPK dan dewan guru, dibentuk berdasarkan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sanjaya W : 2013) bahwa yang menjadi landasan formal kurikulum disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kondisi ideal yang diharapkan dalam penelitian adalah tim pengembang kurikulum bertugas merancang kurikulum dan mengembangkan kurikulum, sehingga kondisi riil yang ditemukan sebagai peluang dalam penelitian ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden dari dinas pendidikan dan kebudayaan dan satuan pendidikan, bahwa sebagai langkah awal dalam perencanaan implementasi kebijakan kurikulum (K13) tim pengembang kurikulum Kota Ambon dan sekolah sampel seperti; SD Negeri 2 Lateri, SMP Negeri 3, SMP Islam Terpadu, Assalam, SMP Negeri 21, SMP Negeri 14, SMP Negeri 2, SMP Al Watahan dan MTs Alfattah serta SMP Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, SMA Negeri 5, SMA Negeri 4, SMK, Pertanian Passo, SMA Negeri 1, SMA

Negeri 1 Leihitu Barat, SMA Negeri 11, dalam melaksanakan perencanaan, baik satuan pendidikan maupun dinas pendidikan dan kebudayaan telah membentuk tim pengembang kurikulum (TPK) Kota Ambon dengan surat keputusan (SK) walikota untuk TPK- K13 tingkat kota, dan surat keputusan (SK) kepala sekolah untuk satuan pendidikan/sekolah.

Sementara tim pengembang kurikulum K13 jenjang pendidikan dasar dan menengah yang langkah-langkahnya adalah; (1) untuk tingkat kota, tim bekerja memberikan materi dalam bentuk pelatihan kepada kepala sekolah, pengawas, kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) serta mengadakan *workshop* untuk guru pemandu, terutama dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kompetensi guru. (2) Pihak yang terlibat dalam tim pengembang kurikulum terdiri dari komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, kepala sekolah, dunia industri dan dunia kerja (DUDI), sumber daya alam dan sosial budaya, semua bekerja sama melakukan monitoring dan evaluasi untuk memvalidasi dokumen kurikulum yang telah dibuat. Hal ini dikemukakan juga oleh Reksoatmodjo, (2010) bahwa orang-orang yang dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada tingkat masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki wawasan yang luas dalam kebudayaan, perekonomian, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain. Mereka diharapkan dapat menyarankan isi kurikulum.

Selanjutnya Rusman, (2011) menyebutkan K13 dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan K13 mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

Hasil wawancara dengan responden dan berdasarkan jawaban tertulis pada lembar pedoman wawancara menjelaskan, pada tataran satuan pendidikan sebagaimana penjelasan beberapa responden, diantaranya; para guru SMA 11 Ambon (DK, HD, SSM), MYI kepala sekolah MTs Alfatah Ambon, September 2109, sebagai berikut:

*Ada beberapa langkah perencanaan, pertama, membentuk tim implementasi kebijakan K13, tim tersebut terdiri dari unsur terkait. Baik dari internal guru, maupun auditor internal (komite) dan stake holder. Kedua, mensosialisasikan regulasi tentang mekanisme penyusunan K13, dan pendampingan oleh instruktur. Ketiga, merumuskan kebijakan dalam item resume. Karena K13 harus mempunyai tujuan yang jelas yang sinergis dengan tujuan nasional.*

Sedangkan penjelasan dari SBD kepala sekolah SMP Negeri 14 Ambon, bahwa sebelumnya tim pengembang kurikulum melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan yang hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses implementasi kebijakan K13, kemudian mengembangkan setiap alternatif berupa metode, evaluasi, personalia, anggaran dan waktu. Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi sesuai kebutuhan dan lingkungan peserta didik untuk mencapai tujuan, yang bersinergi dengan tujuan nasional. Berdasarkan informasi Wakasek Kurikulum, HMM, menjelaskan bahwa;

*Identifikasi masalah dilakukan sebelum melaksanakan rapat kerja sekolah, agar program yang akan dibuat sesuai dengan kondisi serta keberadaan sesuai kebutuhan sekolah yang disesuaikan dengan anggaran (BOSNAS dan BOSDA) yang diterima sekolah.*

Hal ini sesuai dengan penjelasan (Rusman, 2011) bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SBD, yakni mengevaluasi setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran dan waktu sesuai dengan hasil verifikasi yang sudah direvisi, menyusun program supervisi, mengembangkan motivasi dan membuat draft rancangan rencana anggaran kerja menengah, berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat. Sedangkan oleh HMM, wakasek kurikulum; menjelaskan bahwa, dikembangkan dalam rapat kerja sekolah setiap tahun, penjabarannya berupa program-program pendidikan yang sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Sementara informasi dari guru senior HD, bahwa sekolah melakukan IDS, yang hasilnya dituangkan dalam RKS dan RKAS.

Hasil wawancara tertutup dengan instrumen pedoman wawancara pada beberapa kepala Sekolah SD, SMP/MTs, SMA yakni; PM, SBD, MYI, dan IBA, SR, dan guru; SSM, HD, maka diperoleh penjelasan bahwa:

*Tim pengembang kurikulum ada yang dari pusat, dari tingkat I, fasilitator dari dinas dikbud, LPMP, LPTK atau lembaga terkait dari kabupaten dan kota, berfungsi untuk menjabarkan perkembangan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, dan memberikan informasi-informasi terkait kebijakan pemerintah menyangkut perkembangan yang ada dalam masyarakat, serta melakukan identifikasi masalah yang dihadapi, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam proses implementasi K13, termasuk menyiapkan program, kemudian menuangkan dalam silabus dan RPP.*

Sementara ada penjelasan Kepala Sekolah, LH, guru, FM, LPL, FY, menjelaskan bahwa;

*Dalam perencanaan kebijakan K13, dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter khususnya integritas dan kemandirian dengan mempertimbangkan inklusi sosial, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan. Termasuk penguatan literasi, penguatan pendidikan karakter, pembelajaran abad 21. Lebih spesifik membuat rencana pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, sehingga melatih siswa berpikir kritis dalam proses pembelajaran.*

Selain itu menurut penjelasan dari beberapa wakasek kurikulum, di antaranya, oleh HMM, menjelaskan bahwa;

*Dalam merencanakan implementasi kebijakan K13, terlebih dahulu dibahas dalam raker sekolah, terutama program-program, kebijakan peningkatan mutu dan kualitas, yang berpedoman pada 8 standar nasional pendidikan dan sesuai dengan visi misi sekolah.*

Berdasarkan penjelasan dari kepala sekolah IPK, bahwa;

*Dalam perencanaan kebijakan K13, membuat dan melaksanakan program, dan kurikulum disusun berdasarkan asas obyektif, keterpaduan, manfaat, efisien dan efektif, kesesuaian dan keseimbangan, kemudahan, berkesinambungan, pembakuan, mutu. Caranya berdasarkan bidang keilmuan yang terdiri atas ilmu sosial, administrasi, ekonomi, komunikasi, dan rekayasa teknologi, IPA, matematika dll. Jenis mata pelajaran disusun dan dikembangkan bersumber dari bidang tersebut sesuai dengan ketentuan program. Tiap mapel dikembangkan menjadi satuan bahasan dan pokok bahasan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar, setiap mapel dikembangkan didalam silabus.*

Informasi lain yang diterima dari hasil wawancara dengan pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, dan guru HD, September 2019, bahwa untuk menentukan alternatif yang paling baik oleh tim pengembang kurikulum, maka melalui hasil verifikasi K13 berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi, dan kemudian memetakan sesuai *schedule* atau jadwal, serta melalui audit mutu internal dan supervisi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi akan diambil alternatif yang paling baik yaitu sesuai dengan kondisi dan karakteristik lingkungan terutama sekolah atau satuan pendidikan, dengan cara mempertimbangkan beberapa *input* dari alternatif yang ada untuk rencana perbaikan kurikulum pada langkah selanjutnya berdasarkan temuan.

Berkaitan dengan hal diatas, Mulyasa. E, (2007) menjelaskan, bahwa mekanisme penyusunan K13 mulai dari pembentukan tim kerja, dalam rangka pengembangan K13, setiap satuan pendidikan perlu membentuk tim pengembang kurikulum. Tim pengembang K13 terdiri dari guru, kepala sekolah, guru pembimbing (konselor), komite sekolah, dalam hal tertentu melibatkan orang tua atau peserta didik. Kemudian penyusunan draft, setelah terbentuk tim pengembang K13, selanjutnya mengembangkan draft K13 yang lengkap mulai dari perumusan visi dan misi satuan pendidikan sampai pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang siap diaktualisasikan dalam pembelajaran. Berikut, revisi dan finalisasi, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun ajaran baru. Kegiatan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi. Langkah lebih rinci dari masing-masing kegiatan dapat diatur dan dikembangkan oleh tim penyusun kurikulum pada masing-masing satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil amatan peneliti menunjukkan, bahwa untuk sekolah sasaran yang berstatus negeri seperti SMP Negeri 14 yang adalah merupakan sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI), pada beberapa tahun lalu, dan SMP Negeri 2, SMP Al-Wathan, SMA Negeri 11, SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, SMK Pertanian, masih dalam kategori baik dalam mengembangkan kurikulum K13 dan sudah melibatkan

berbagai unsur atau kelompok terkait dalam hal ini Dinas Dikbud Provinsi dan Kota Ambon, Orang tua murid, *stakeholder*, nara sumber ahli/LPTK, LPMP dan lain-lain.

Secara riil tantangan dan hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini, adalah pada umumnya sekolah swasta belum melakukan analisis kondisi lingkungan eksternal, alasannya belum memahami pentingnya analisis konteks dengan penyusuaian K13 dan penyusunan program kerja sekolah. Kalaupun ada sekolah yang sudah melakukan analisis konteks, maka belum dapat mendokumentasikan secara baik hasil analisis, karena belum memahami bahwa dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen K13.

*Bahkan pihak sekolah beralasan karena tidak ada naskah panduan yang dapat dijadikan acuan bagi sekolah untuk melakukan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan secara benar yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh dari jawaban tertulis beberapa responden, dan data beberapa sekolah swasta yang diteliti yaitu SMP Alwathan, ini masih tergolong baik, dan MTs Alfatah serta SMP Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah dalam penelitian ini termasuk kategori sedang. Terkadang dalam mengembangkan kurikulum melibatkan komponen tim pengembang kurikulum, tetapi pada saat yang lain tidak melibatkan tim pengembang kurikulum. Sebagaimana penjelasan yang diperoleh dari informan JR, kepala seksi pengembang kurikulum dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Ambon, hasil wawancara beberapa waktu lalu, sebagai berikut; serta memiliki kurikulum, hanya menjiplak (kopi paste) dari kurikulum sekolah lain. Sekolah seperti ini, tim pengembang kurikulum dan pengawas melakukan pendampingan kepada mereka untuk membantu menyusun kurikulum sekolah, ketentuan ini berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005. Ini memang aturan dan prosedur, jadi memang tidak masalah hanya persoalannya nanti keenakan saja, para guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan tidak memaksa diri untuk berusaha megembangkan kurikulum dalam hal ini K13.*

Selanjutnya informasi oleh JR, menjelaskan bahwa:

*Pengembangan K13 ada di sekolah, dirumuskan sesuaikan dengan kondisi sekolah. Dinas Dikbud punya visi besar untuk diimplementasikan. Alurnya dari dinas pendidikan ke UPTD (penjabaran), dan UPTD ke satuan pendidikan (penjabaran). Sehingga ada suatu kesatuan, ini juga terkait dengan muatan lokal (local wisdom dari masyarakat kota).*

Selain itu penjelasan dari hasil wawancara dengan SR, kepala sekolah SMP Alwathan, Oktober 2019, bahwa:

*Kita dalam mengembangkan K13 selalu menghadirkan pihak-pihak terkait, juga kadang tidak..., tim pengembang kurikulum sekolah dibentuk dengan diketuai oleh wakasek kurikulum dan anggota para guru yang dikelompokkan berdasarkan bidang studi. Kepala sekolah punya tugas mengontrol dan mengawasi, membina dan memang dia koodinator. Nanti kalau perlu diundang dari pihak perguruan tinggi atau kita pakai nara sumber ahli. Biasa juga "katong" ambil dari FKIP Unpatti. Memang dinas pendidikan tetap kita undang juga, termasuk pengawas sekolah.*

Sehingga upaya pencapaian atau tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pihak dinas pendidikan kebudayaan dan satuan pendidikan dalam memperbaiki kondisi yang ada, yaitu melakukan kegiatan pelatihan berupa *in-service training* tentang analisis kondisi lingkungan eksternal bagi warga sekolah agar mereka dapat mengembangkan kurikulum (K13).

Komponen selanjutnya yang menjadi amatan peneliti adalah komite sekolah. Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 butir 25 dan bab XIV pasal 56 ayat 1. Kondisi riil yang ditemukan sebagai peluang dalam penelitian ini yaitu komite sekolah memiliki potensi sebagai nara sumber dalam peningkatan mutu sekolah, membantu sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan menggalang dana dari masyarakat, sehingga oleh Hasbullah, (2006:90) menjelaskan bahwa tujuan komite sekolah yaitu (1) mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sesuai penjelasan infoman tentang keberadaan komite sekolah, penjelasan dari tokoh masyarakat As, dan HT wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMP Negeri 2 Ambon, bahwa:

*Memang kalau merujuk pada Kepmendiknas nomor 044/20002, untuk keberadaan komite sekolah sangat penting, karena sebagai badan mandiri yang mewakili peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dan jika dilihat juga..., komite ini memiliki*

*fungsi dan peran yang sangat penting sekali. Sebetulnya komite ini kalau dilihat dia mitra sekolah. Jujur saja kehadiran komite sekolah ini..., biasa digunakan pada rapat-rapat pertemuan orang tua murid, atau dengan kata lain cuma formalitas saja, tidak terlalu penting. Suatu kekurangan besar yaitu para orang tua dan wali murid, mereka juga tidak faham fungsi dan peran dari komite sekolah. Bukan komite ini hadir buat cari-cari dana bantuan untuk sekolah atau sebagai pelengkap saja. Karena ada juga yang dari pihak sekolah tidak mau memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai komite sekolah. Saya kira saatnya komite sekolah perlu diberdayakan semaksimalnya sesuai fungsi, peran, dan tanggung jawab dalam turut menyelenggarakan pendidikan, sehingga bisa lebih efektif dan efisien..., Jangan hanya komite sekolah digunakan sebagai tukang minta-minta dana pada para orang tua murid untuk kepentingan sekolah yang tidak jelas.*

Kemudian komponen atau aspek yang menjadi amatan peneliti adalah asosiasi profesi. Kondisi ideal yang diharapkan adalah, asosiasi profesi sebagai orang-orang yang memiliki kepentingan sama dalam bidang pendidikan untuk memberikan masukan, saran dan kritikan terhadap kemajuan pendidikan terutama satuan pendidikan dalam hal bentuk kerjasama dalam mengembangkan sumber daya manusia, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, maka kondisi riil yang ditemukan sebagai peluang dalam penelitian ini adalah asosiasi profesi memiliki potensi untuk memberikan masukan yang konstruktif untuk pengembangan satuan pendidikan. Informasi yang diperoleh dari beberapa kepala sekolah sasaran di antaranya HL kepala sekolah Muhammadiyah, SR kepala sekolah SMP Alwathan, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan K13 belum pernah melibatkan asosiasi profesi. Sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan 2 orang responden SBD dan SR September 2019 sebagai berikut;

*Selama ini dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum belum pernah asosiasi profesi itu terlibat, persoalannya kita juga tidak tahu mereka itu peranannya apa? dan fungsi mereka juga kita tidak tahu. Kalaupun mereka itu ada kita belum yakin mereka bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi atau kah tidak? Kadang kalau kita undang dia tidak datang, kalaupun dia menghadiri undangan kita, palingan katong bayar ongkos transport dan honor dia lagi, jadi memang susah. Kita mau dibantu dan cari solusi, taunya datang bikin beban. Persoalannya kalau mau jujur..., agak pelik, kita mau maju memang harus usaha dan banyak tantangannya.*

Sehingga yang menjadi tantangan adalah bahwa, asosiasi profesi yang ada belum berperan sebagaimana mestinya, terbukti dari informasi yang diterima dari pihak sekolah baru sebagian yang memanfaatkan peran lembaga tersebut dalam pengembangan



kurikulum, sebagaimana informasi dan penjelasan SBD, kepala sekolah SMP Negeri 14 Ambon, beberapa waktu lalu, sebagai berikut:

*Kebiasaan di sekolah ini kalau ingin melaksanakan perencanaan pengembangan kurikulum K13 pada setiap awal tahun ajaran setelah selesai kegiatan evaluasi. Kita undang semua unsur terkait yang punya kompetensi dengan pengembangan kurikulum dalam hal ini K13. Yang diundang itu antara lain dari dinas, sebagai nara sumber undang ahli dari Unpatti atau Fakultas Keguruan (untuk ini beliau menyebutkan nama orang yang bersangkutan), kemudian komite sekolah, stakeholders, dari pemuka agama juga, tokoh masyarakat, budayawan, perwakilan orang tua dengan biasanya juga ada LSM, dan dari unsur PGRI yang ini untuk mewakili organisasi profesi. Kita bentuk tim pengembang kurikulum yang ketuanya itu wakasek kurikulum dan anggotanya dari guru-guru di sekolah ini. Kegiatan selama satu hari penuh, nanti berikutnya dilanjutkan oleh sekolah dalam hal ini para guru dibawah koordinasi wakasek kurikulum dan kepala sekolah selaku pembina. Kita giatkan juga MGMP dan untuk berperan dalam kelompok bidang-bidang studi.*

Sehingga upaya pencapaian dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan, adalah harus melakukan kegiatan perencanaan berupa *workshop* tentang implementasi kebijakan K13 dengan melibatkan serta asosiasi profesi, bila perlu diundang sebagai nara sumber guna memanfaatkan kesempatan berdialog dan berdiskusi untuk memberikan masukan tentang bagaimana mengembangkan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.

Komponen atau aspek amatan yang berikut adalah dunia industri dan dunia usaha (DUDI). Kondisi ideal yang diharapkan dalam penelitian ini adalah, adanya jalinan kerja sama dengan dunia pendidikan dan dunia usaha. Menjalinkan kerja sama dalam berbagai hal terkait kebutuhan dunia kerja yang mampu dipersiapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Kondisi riil yang ditemukan sebagai peluang dalam penelitian ini adalah, bahwa dunia industri dan usaha memiliki mengembangkan kompetensi kewirausahaan menunjang kompetensi manjerial terutama bagi pemimpin sekolah.

Pada umumnya satuan pendidikan belum memanfaatkan peranan dunia industri dan dunia usaha ini. Sehingga sekolah belum dapat berkembang mengikuti laju dan kemajuan dunia usaha dan industri yang ada di lingkungan sekitarnya. Satuan pendidikan tidak ada upaya untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang

mendukung kebutuhan sekolah. Seperti pada penjelasan dari hasil wawancara dengan Ls, kepala sekolah SMP Negeri 2 Ambon September 2019, sebagai berikut:

*Untuk sekolah menengah pertama yang level seperti kita ini, menyangkut dunia industri memang kita mau kerjasama dengan mereka cuman....., masalahnya itu terlebih-lebih mesti kita paham dulu aspek apa yang harus menjadi tujuan kerjasama. Karena barangkali untuk level sekolah menengah atas SMA lah, terutama sekolah menengah kejuruan SMK, sebab harus sesuai dengan kebutuhan sekolah dan user atau pengguna nanti. Makanya memang kita paling-paling untuk kepentingan seperti untuk kebutuhan rutin, misalnya, ATK, operasional sekolah, pakaian seragam sekolah, atau maintenance atau pemeliharaan sekolah yang menyangkut soal teknis saja. Kalau untuk sarana penunjang pembelajaran kan..., kita dapat bantuan dari pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan kota Ambon dan provinsi Maluku, bahkan mungkin dari pemerintah pusat. Memang sekarang ini lagi berusaha memikirkan kira-kira apasih yang menjadi focus untuk kerjasama ini dengan dunia usaha. Tapi menurut hemat kita ya, itu sangat penting sekali. Hanya kalau dapat itu ada bimbingan dan pendampingan dari Pemda Kota atau Provinsi, dan komite sekolah serta stakeholder lebih bagus lagi.*

Upaya pencapaian yang harus dilakukan berkaitan dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan perlu melakukan mediasi serta upaya komunikasi dengan dunia industri dan dunia usaha dalam memfasilitasi dan membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kewirausahaan di sekolah.

Komponen atau aspek amatan selanjutnya, adalah dinas pendidikan dan kebudayaan Kota dan Provinsi. Kondisi ideal yang diharapkan dalam penelitian ini adalah, dinas pendidikan mempunyai kewenangan membuat kebijakan atau keputusan serta merumuskan peraturan-peraturan besama dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), yang berhubungan dengan perencanaan program yang akan dilaksanakan satuan pendidikan.

Kondisi riil yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai peluang adalah, dinas pendidikan berkewenangan untuk membina dan mengarahkan satuan pendidikan dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum satuan pendidikan (K13). Lebih khusus dalam pengembangan silabus, oleh Mulyasa. E, (2007) menjelaskan, dinas pendidikan provinsi mempunyai peran dan tanggung jawab adalah; menyesuaikan buku teks pelajaran dengan silabus, baik silabus yang yang dikembangkan oleh diknas maupun oleh satuan pendidikan. Membuat contoh silabus yang efektif dan efisien dan sesuai dengan kondisi daerah provinsi, serta mudah deiterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Memberikan

kemudahan dalam pembentukan tim pengembangan silabus tingkat kabupaten atau kota, melalui pembinaan, penataran dan pelatihan, memberikan dukungan sumber-sumber daya pendidikan untuk kepentingan penyusunan silabus dan tugas dan tanggung jawab lainnya.

Untuk hal ini penjelasan dari Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Ambon, bapak JR, dalam wawancara Oktober 2019 sebagai berikut:

*Kebijakan dinas pendidikan dalam implementasi kebijakan K13, sudah mempunyai tim pengembang kurikulum kota meliputi jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah. Langkah-langkahnya adalah, pertama, tim bekerja memberikan materi dan pelatihan penyusunan K13 kepada para kepala sekolah, MGMP, workshop guru pemandu mata pelajaran ini untuk K13 tahun 2010/2012 lalu, ini dalam rangka memperkuat kompetensi, kedua, bekerjasama dengan tim melakukan monev untuk memvalidasi kurikulum. Ada sekolah yang berjalan tanpa kurikulum, mereka kopi-paste dari sekolah lain, sehingga dilakukan pendampingan oleh pengawas dan tim terhadap sekolah yang bersangkutan.*

Selanjutnya sebagai data tambahan mengenai pengembangan kurikulum K13 di Kota Ambon dapat dijelaskan melalui hasil wawancara dengan kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Ep, pada beberapa waktu lalu, sebagai berikut:

*Bahwa tim pengembang kurikulum tingkat provinsi dan kota komunikasinya belum terlalu baik untuk kemudahan-kemudahan dalam upaya pengembangan kurikulum. Walikota Ambon sudah menerbitkan SK untuk pengembangan K13 di sekolah-sekolah. Sudah ada aplikasi tetapi tidak memadai. Semua K13 di Kota Ambon ini perlu ditinjau kembali karena belum diketahui oleh dinas pendidikan/kadis pendidikan, karena hasilnya bisa terjadi pembiasaan. Harus dilakukan program review setiap tahun agar ada perbaikan khusus terhadap kurikulum oleh tim pengembang agar standarnya sesuai dengan standar isi yang ada. Lemahnya ada pada koordinasi, sehingga kalau sudah berjalan baik kemungkinan juga baik hasilnya. Yang turut berpengaruh dalam pengembangan kurikulum juga adalah masalah kebijakan tentang dana APBD Propinsi untuk pelatihan penyusunan K13 di sekolah atau satuan pendidikan. Terutama untuk para peserta pelatihan, seperti guru pada beberapa tahun lalu, dananya hanya bisa untuk 24 orang peserta, dengan harapan setelah itu imbas ke sekolah untuk mengembangkan di satuan-satuannya sesuai karakteristiknya, kalau kita minta peserta 5 orang untuk ikut pelatihan, yang dikirim cuma 1 orang saja. Yang seperti ini, kira-kira kapan baru bisa buat sesuatu yang bermanfaat, ada perubahan dan pengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah.*

Tantangan yang masih ditemukan dalam penelitian ini adalah, dinas pendidikan dan kebudayaan dalam berperan sebagai pihak pembina dan pengawasan terlihat belum terlalu nampak. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pengembangan kurikulum secara sendiri tanpa melibatkan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya komponen atau aspek yang menjadi amatan adalah perguruan tinggi/LPTK/Fakultas Keguruan. Kondisi ideal yang diharapkan dari peran perguruan tinggi dalam kegiatan perencanaan pengembangan kurikulum, adalah membantu pihak dinas pendidikan dan satuan pendidikan dalam hal bantuan secara akademis sesuai kebutuhan. Membimbing dan mengarahkan satuan pendidikan dalam membuat dan merencanakan program pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Melayani kebutuhan satuan pendidikan dalam bentuk konsultasi/advokasi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan program pengembangan kurikulum di sekolah.

Kondisi riil yang peneliti temukan sebagai peluang dalam penelitian ini, adalah lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan kualifikasi akademik serta peningkatan mutu dan profesionalitas sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah memanfaatkan tenaga profesional dari perguruan tinggi/LPTK sebagai pakar atau nara sumber ahli dalam memberikan solusi dan masukan bagi kebutuhan pengembangan satuan pendidikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan dua orang pakar dari LPTK Unpatti Ambon, bapak J.A. dan FL beberapa waktu lalu, dan bapak sebagai berikut:

*Biasanya kalau kita terlibat dalam proses pengembangan kurikulum itu diundang oleh dinas pendidikan kota Ambon atau Provinsi Maluku. Untuk satuan pendidikan itu jarang sekali. Memang ada sekolah tertentu kalau mereka mau lakukan perencanaan pengembangan kurikulum melibatkan nara sumber dari LPTK dalam hal ini FKIP sebagai pakar atau ahli, namun yang untuk beberapa tahun terakhir ini kalau saya itu dipakai di dinas pendidikan saja. Kadang sekali diundang ke sekolah-sekolah. Pernah tahun-tahun lalu ada beberapa sekolah seperti SMP Negeri 14, SMP Negeri 4, SMP Negeri 2, pernah saya diundang. Karena menyangkut ini juga mesti sekolah butuh, kalau seng yah...., apa boleh buat, mereka buat sendiri saja. Ini juga kan jadi persoalan sebab kadang dinas pendidikan juga seng bisa menjangkau ke sana maksudnya memantau perkembangan pada sekolah-sekolah itu. Beta terlibat untuk tim pengembang kurikulum (K13) di Kota Ambon untuk tahun lalu juga tingkat Provinsi. Nanti untuk yang seperti itu akan diberi tahu dan akan dibuat rapat, kemudian dinas pendidikan meng-SK kan. Untuk ini, juga pernah kira-kira 2 atau 3 tahun lalu itu*

*ada SK Gubernur Maluku untuk tim pengembang kurikulum tingkat provinsi, beta ada nama cuman.., untuk pekerjaan selanjutnya sudah tidak tahu lagi ujung pangkalnya. Jadi ini menyangkut pemahaman dan kesadaran untuk bagaimana sekolah itu maju dan memperbaiki mutu saja.*

Selanjutnya dalam hubungan dengan keterlibatan nara sumber dari LPTK/pakar perguruan tinggi, maka sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Ambon, JR, beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa:

*Ada tim ahli (pakar) dari Universitas Pattimura Ambon, dalam hal ini FKIP/LPTK diundang mendampingi instruktur untuk membantu guru menyusun K13. Tim terbentuk, kemudian berkumpul guna diberi tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan dalam mengimplementasi kebijakan K13. Misalnya keahlian instruktur diarahkan untuk mengembangkan sesuai materi.*

Kemudian mengenai keterlibatan pakar dalam pengembangan kurikulum, informasi yang diterima dari sekolah, sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah MTs Alfatah, MYI, tanggal 15 September 2019, bahwa:

*Untuk keterlibatan pakar dalam pengembangan kurikulum, ya..., tetapi kita belum menyentuh teknologi pendidikan.*

Tantangan yang dihadapi dalam penelitian adalah akses satuan pendidikan dalam memanfaatkan peran perguruan tinggi (PT) masih rendah. Masih ada jarak atau *gap* antara satuan pendidikan dan perguruan tinggi (LPTK) dalam hal memperoleh masukan dan informasi yang bermutu yang sifatnya akademis untuk pengembangan kurikulum dalam kaitan dengan pengembangan pendidikan di sekolah. Upaya pencapaian yang harus dilakukan adalah satuan pendidikan melaksanakan kegiatan *workshop* atau *inservice training* atau pelatihan selama satu sampai tiga hari untuk memfasilitasi para kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Mengundang nara sumber dari LPTK untuk memberikan materi yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum (K13) pada satuan pendidikan

Komponen atau aspek amatan selanjutnya adalah LPMP. Kodisi ideal yang diharapkan dari penelitian ini adalah, LPMP berfungsi untuk melakukan pembinaan dan bagi pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi, dalam hal ini para guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mengontrol dan mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum satuan pendidikan (K13).

Menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan, Perguruan Tinggi/LPTK, masyarakat dan *stakeholders*, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Kondisi riil sebagai tantangan yang muncul dan ditemukan dalam penelitian ini adalah, sering kali terjadi *miss*-komunikasi atau perbedaan pendapat antara dinas pendidikan dan pihak LPMP dalam hal yang berhubungan dengan pengembangan program pendidikan disatuan pendidikan/sekolah, terutama tentang masalah kebijakan dan birokrasi. Sehingga menjadi hambatan bagi pelaksanaan program dilapangan. Terkesan saling mencari pembenaran antar lembaga terkait yang berakibat kemandekan dan hambatan terhadap kelancaran dan mekanisme pelaksanaan program dilapangan. Jadi hambatan utama ada pada koordinasi yang lemah.

Sebagaimana penjelasan kepala LPMP Provinsi Maluku, LOS beberapa waktu lalu sebagai berikut:

*Kalau bicara peran, fungsi dan kewenangan LPMP yaa..., dalam kaitan dengan pengembangan K13, secara tidak langsung karena kewenangan itu pada dinas pendidikan dan kebudayaan seta satuan pendidikan/sekolah. LPMP berperan untuk pembinaan dan pelatihan serta melakukan monitoring dan evaluasi dan perbaikan mutu pendidikan secara umum, tetapi secara khusus kan membantu dinas pendidikan dalam rangka memberikan masukan-masukan serta solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan menyangkut mutu pendidikan di wilayah, terutama untuk wilayah Provinsi Maluku. Kalau untuk pengembangan kurikulum K13, keterlibatan kita dalam hal evaluasi dan monitoring. Di sana kalau kita ketemu masalah kita laporkan perkembangan kepada pusat karena LPMP kan lembaga vertikal, butuh kajian dan analisis di tingkat wilayah/provinsi, kemudian di pusat juga akan dikaji dan dipertimbangkan cara penanganannya untuk perbaikan program. Sedangkan hasil-hasil monev serta pengamatan pihak kami LPMP ini hasilnya dapat di lakukan sharing dengan dinas pendidikan, LPTK, sewaktu-waktu dibuat kegiatan juga dan melibatkan Pemda Propvinsi/Kabupaten/Kota, dalam kegiatan rapat koordinasi untuk saling memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan di Maluku. Lebih khusus untuk pengembangan K13 di sekolah-sekolah, biasanya juga nanti kalau mereka butuh tenaga dari LPMP dalam hal ini widiyaswara, mereka surati kami dan akan kami bantu tenaga WI untuk bersama-sama membuat pengembangan kurikulum (K13). Harapan kita para staf WI dari LPMP ini harus menguasai dan memahami isi dan konten dari 8 standar pendidikan nasional yang kita semua merujuk dari BSNP dengan Peraturan Pemerintah serta Permendiknas yang ada, kemudian disesuaikan dengan kondisi karakteristik dari satuan pendidikan. Sehingga mereka dapat menjabarkan secara spesifik apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Untuk yang ini..., pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan aturan dan bimbingan*

*serta arahan tim pengembang kurikulum dinas Pendidikan Kota Ambon dan Kementerian Agama Kota Ambon.*

Upaya pencapaian yang harus dilakukan adalah melaksanakan kegiatan dengan melibatkan dinas pendidikan dan LPTK atau lembaga terkait khusus untuk menyatukan persepsi dan pendapat, serta membuka isolasi atau *gap* antara berbagai pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pengembangan pendidikan disatukan pendidikan. Membuka komunikasi antar pimpinan lembaga sehingga terjalin hubungan yang erat antara lembaga dalam saling tukar pendapat dan informasi mengenai masalah pendidikan yang terjadi pada setiap lembaga. Membuat komitmen kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan program pengembangan kurikulum K13 pada satuan pendidikan.

## **Penutup**

### **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan pembahasan hasil penelitian di atas maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Satuan pendidikan dalam melaksanakan perencanaan, baik satuan pendidikan maupun dinas pendidikan dan kebudayaan telah membentuk tim pengembang kurikulum (TPK) Kota Ambon dengan surat keputusan (SK) walikota untuk TPK-K13 tingkat kota, dan surat keputusan (SK) kepala sekolah untuk satuan pendidikan/sekolah. Satuan pendidikan dalam perencanaan kebijakan K13, mengevaluasi setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran dan waktu sesuai dengan hasil verifikasi yang sudah direvisi, menyusun program supervisi, mengembangkan motivasi dan membuat draft rancangan rencana anggaran kerja menengah, berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat, kerja sekolah setiap tahun, penjabarannya berupa program-program pendidikan yang sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan.
- 2) Satuan pendidikan melakukan identifikasi masalah yang dihadapi sesuai kebutuhan dan lingkungan peserta didik untuk mencapai tujuan, yang bersinergi dengan tujuan nasional. Identifikasi masalah dilakukan sebelum melaksanakan rapat kerja sekolah, agar program yang akan dibuat sesuai dengan kondisi serta keberadaan sesuai

kebutuhan sekolah yang disesuaikan dengan anggaran (BOSNAS dan BOSDA) yang diterima sekolah. Satuan pendidikan untuk menentukan alternatif yang paling baik melalui hasil verifikasi K13 berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian memetakan sesuai *schedule* atau jadwal, serta melalui audit mutu internal dan supervisi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi akan diambil alternatif yang paling baik yaitu sesuai dengan kondisi dan karakteristik lingkungan terutama sekolah atau satuan pendidikan, dengan cara mempertimbangkan beberapa *input* dari alternatif yang ada untuk rencana perbaikan kurikulum pada langkah selanjutnya berdasarkan temuan.

- 3) Dinas pendidikan dan satuan pendidikan belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, karena belum tampak pembinaan dan pengawasan dalam menggiatkan pihak- pihak, komponen atau unsur-unsur yang terlibat sebagai implementor kebijakan K13 di Kota Ambon. Dalam komunikasi antar instansi terkait, implementor dan *stakeholders* masih belum menunjukkan pola-pola hubungan yang harmonis, dan terjadi kondisi *red-tape* suatu kondisi yang menghambat implementasi kebijakan KTSP. Masih ditemukan adanya praktek birokrasi yang rumit dan berbelit-belit serta koordinasi yang lemah antar instansi terkait sehingga menghambat mekanisme implementasi kebijakan kurikulum.

### **Saran**

Kiranya pembuat kebijakan dalam mengembangkan kurikulum, terlebih dahulu melibatkan semua pihak seperti unsur dinas pendidikan dan kebudayaan, satuan pendidikan, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh politik, pelaku ekonomi, budayawan, dewan pendidikan, komite sekolah, *stakeholders* untuk membentuk tim pengembang kurikulum (TPK), baik pada satuan pendidikan, maupun tingkat kabupaten/kota, sehingga mempersiapkan secara matang mulai dari tahap perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan atau implementasi, evaluasi sampai dengan perubahan dan perbaikan kurikulum.



## Daftar Pustaka

- Apradipto. (2015). Pro Kontra Kebijakan Kurikulum 013. *Www.Batararayamedia.Com*.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B.H.M., 2010. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Fajar Interpretama Offset. Jakarta.
- Huberman, A.M., 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. penerjemah Cecep Rohendirohidi. Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyasa. E. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sebuah Panduan Praktis*. Malang: PT. Remaja Roksa Karya.
- Nugroho Riant Dwijodijoto. (2013). *Kebijakan Piublik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media komputindo Kelompok Garamedia.
- Reksoatmodjo. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusman. (2011). *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sanjaya Wina. (2013). *Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Media Grup.
- Tempo.co. (2013). *Problematika Implementasi Kurikulum 2013*. *Www.Tempo.Co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/read/kolom/2013/07/10/762/Problematika-Implementasi-Kurikulum-2013>
- Widodo. (2011). *Analisa Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayu Media.